KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1901 / SEK/SK.PW1/XII/2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI TAHUN 2024 PADA 259 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa telah diusulkan sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sebagai satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - b. bahwa terhadap 259 (dua ratus lima puluh sembilan) satuan kerja di bawah Mahkamah Agung tersebut telah dilakukan rangkaian evaluasi terhadap proses dan hasil pembangunan zona integritas menuju WBK secara mandiri;
 - c. bahwa terhadap seluruh tahapan hasil evaluasi atas pembangunan zona integritas menuju WBK secara mandiri juga telah melalui supervisi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rapat panel final dan clearance;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang

Penetapan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Satuan Kerja;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
 Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali
 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49
 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
 Peradilan Umum;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

- Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System);
- 11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI TAHUN 2024 PADA 259 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA.

KESATU

: Menetapkan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2024 pada 259 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SUGIYANTO

2

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;

5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1901/SEK/SK.PW1/XII/2024 TANGGAL: 23 Desember 2024

HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI PADA 259 (DUA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN) SATUAN KERJA

A. RINGKASAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) SECARA MANDIRI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2024

Ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas menuju WBK secara mandiri di lingkungan Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai berikut:

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Permintaan Evaluasi dari Sekretaris MA RI kepada Tim Penilai Nasional dan Tim Penilai Internal (Evaluasi Mandiri), untuk mengevaluasi 259 (dua ratus lima puluh		Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor 3012/SEK/OT1/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 Hal Pengajuan Usulan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju
	sembilan calon unit kerja berpredikat WBK.		Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Evaluasi Mandiri;
2	Unit Kerja yang Tidak Memperoleh Predikat WBK (Evaluasi Mandiri)		Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi

	i ,		
memenuhi se		Unit	Keterangan
memenuhi se		Kerja	
memenuhi se			Pemerintah Pelaksana Sistem
memenuhi se			Peradilan Pidana (<i>Criminal</i>
memenuhi se			Justice System)
	tidak	144	Unit kerja yang tidak
administrasi	leksi		memenuhi kriteria pengusulan
			sebagaimana diatur dalam
			Peraturan Menteri PANRB
			Nomor 90 tahun 2023, serta
			telah diumukan dalam Surat
			Pengumuman Tim Penilai
			Internal Nomor
			1087/BP/PW.1.1.1/IX/2024
		,	tanggal 03 September 2024
			tentang Hasil Seleksi
			Administrasi Zona Integritas
			menuju Wilayah Bebas dari
			Korupsi (WBK) secara mandiri
			tahun 2024 dan Surat
			Pengumuman Tim Penilai
			Internal Nomor
			1101/BP/PW.1.1.1/IX/2024
			tanggal 10 September 2024
			tentang Hasil Sanggah atas
			Seleksi Administrasi Zona
			Integritas menuju Wilayah
			Bebas dari Korupsi (WBK)
			secara mandiri tahun 2024
			meluluskan 115 (seratus lima
			belas) atau 44,40% (empat
F			puluh empat koma empat nol
			persen) dari total calon unit
r			kerja berpredikat WBK untuk
			mengikuti evaluasi pada tahap
			selanjutnya yakni <i>Desk</i>

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
			Evaluation – Analisis Dokumen
	b. Unit Kerja yang tidak memenuhi kriteria Desk Evaluation - Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung	75	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria Analisis Dokumen LKE dan Data Dukung, serta telah diumumkan dalam Surat Pengumunan Tim Penilai Internal Nomor 1161/BP/PW.1.1.1/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 tentang Hasil Penilaian (Desk Evaluation) — Analisis Dokumen Lembar Kerja Evaluasi Zona Integriotas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit kerja atau sebanyak 28,96% (dua puluh delapam koma sembilan puluh enam persen). Sisanya sebanyak 40 (empat puluh) atau 15,44% (lima belas koma empat puluh empat persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK mengikuti evaluasi pada tahap selanjutnya yakni Desk Evaluation — Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024.

No	Tahapan Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
	c. Unit Kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>Desk Evaluation</i> – Wawancara dan Verifikasi Lapangan	13	Unit kerja yang tidak memenuhi kriteria <i>Desk Evaluation</i> – Wawancara dan Verifikasi Lapangan sebanyak 13 (tiga belas) atau 5,02% (lima koma nol dua persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.
	d. Unit Kerja yang tidak lulus Clearance	3	Unit Kerja yang tidak lulus clearance dari KPK, BIN dan/atau ORI
3	Unit Kerja yang memperoleh predikat WBK	24	Unit Kerja yang diusulkan meraih predikat WBK sebanyak 24 (dua puluh empat) atau 9,27 (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari total calon unit kerja berpredikat WBK.

Jumlah unit kerja yang lulus sebanyak 24 (9,27%) dan unit kerja yang tidak lulus sebanyak 235 (90,73%).

B. DAFTAR SATUAN KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1.a. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Gorontalo	LKE Manual namun tidak ada catatan maupun link data dukung Laporan survey menggunakan format lama IKM dan IPAK (tidak sesuai format SE Menpan No 4 Tahun 2023)
2	Pengadilan Tinggi Jayapura	LKE Manual, namun nilai belum diisi dan belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
3	Pengadilan Tinggi Kupang	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id . Tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun yang disampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
4	Pengadilan Tinggi Manado	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen Terdapat 1 Aparatur terlambat melaporkan SPT Pajak 2023 yang baru dilaporkan 6 Mei 2024
5	Pengadilan Tinggi Padang	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari

		aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id.
6	Pengadilan Tinggi	LKE belum menggunakan format
	Samarinda	LKE Manual tetapi menggunakan
		LKE dari aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id dan
		tidak ada penjelasan alasan
		pemberian nilai pada setiap sub
		komponen
		Survei dilaksanakan tidak sesuai
		dengan kebijakan Dirjen Badilum
		berdasarkan surat nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian
		Evaluasi Mandiri Zona Integritas

1.b. Lingkungan Peradilan Umum - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Negeri Ende	 LKE menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen. Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas TLHP belum 100%
2	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	- LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id

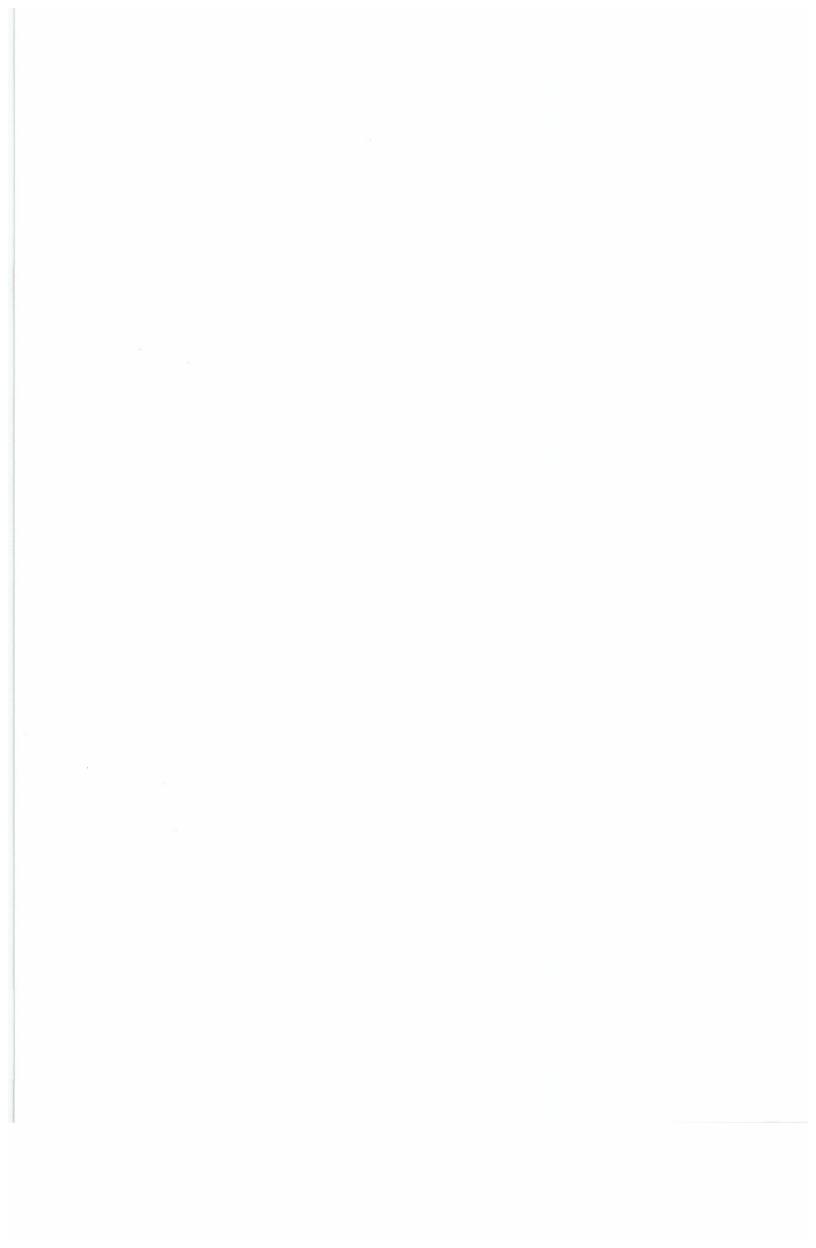
No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		- Periode Survei Triwulan I Tahun
		2024 dan tidak ada Laporan Hasil
		Survei sesuai format namun hanya
		informasi hasil survei
3	Pengadilan Negeri Kudus	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
4	Pengadilan Negeri	Laporan Suvey menggunakan format
	Lhokseumawe	lama (IKM dan IPAK) dan periode
		Survey TW I (Januari-Maret 2024)
5	Pengadilan Negeri Limboto	LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan tidak ada tautan data
		dukung
6	Pengadilan Negeri Maumere	Tautan Dokumen LKE tidak dapat
		diakses
		Periode Survei Triwulan I Tahun
		2024 dan hanya Pelaporan SPAK
		saja dan tidak ada Laporan SPKP
	à	nya sehingga tidak sesuai dengan
		persyaratan format laporan survei.
7	Pengadilan Negeri Muara	• LKE Manual, namun tidak ada nilai
	Teweh	Survei dilaksanakan tidak sesuai
		dengan kebijakan Dirjen Badilum
		berdasarkan surat nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024

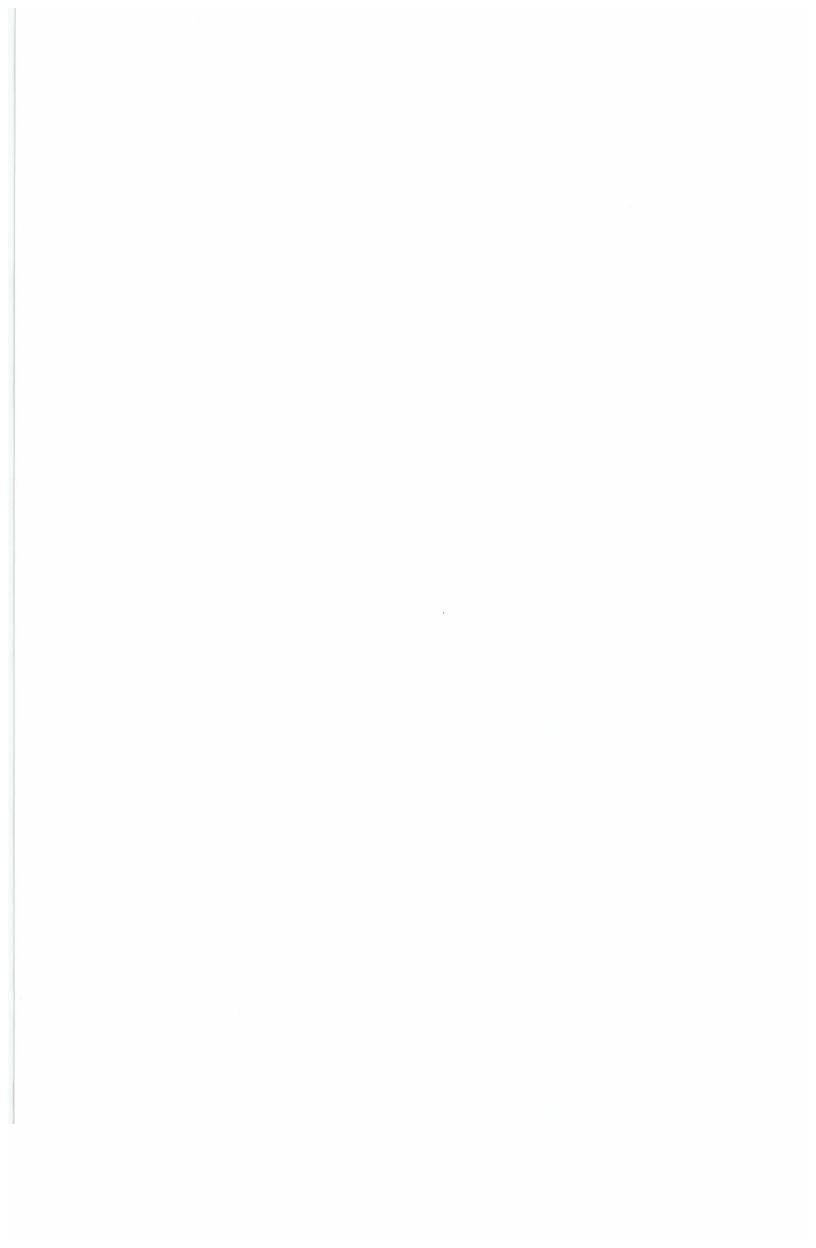
No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
	,	Survei Mandiri dan Penilaian
		Evaluasi Mandiri Zona Integritas
8	Pengadilan Negeri Pagar	LKE Manual kosong, tidak ada
	Alam	catatan atau link data dukung
9	Pengadilan Negeri Palembang	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; Survei dilaksanakan tidak sesuai
		dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
10	Pengadilan Negeri	Tidak ada Laporan Survei Persepsi
	Purbalingga	Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
11	Pengadilan Negeri Sanggau	- LKE manual namun tidak sesuai format dan tidak ada catatan atas nilai yang diberikan TLHP belum 100%
12	Pengadilan Negeri Suka	- LKE Manual belum ada
	Makmue	catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; - Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor
	947	Badilum berdasarkan surat nome 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tangg

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		17 April 2024 Hal Pengisian Survei
		Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
13	Pengadilan Negeri Tegal	LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen
14	Pengadilan Negeri Airmadidi	LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen
15	Pengadilan Negeri Amurang	- Laporan Survei TW I (Januari-Maret)
		tidak sesuai format (SE Menpan No.4
		Tahun 2023)
		- TLHP belum 100%
16	Pengadilan Negeri Atambua	- LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen
		- Terdapat Aparatur yang belum
		menyampaikan LHKPN
		- Tidak ada Laporan SPKP dan SPAK
	9	sesuai sesuai dengan kebijakan
		Dirjen Badilum berdasarkan surat
		nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
17	Pengadilan Negeri Batam	- LKE Manual belum ada nilai, belum
		ada catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan tidak mencantumkan
		tautan data dukung
	*	- Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga
		belum sesuai dengan kebijakan Dirjen

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Badilum berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal
		17 April 2024 Hal Pengisian Survei
		Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
18	Pengadilan Negeri Batulicin	Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga
		belum sesuai dengan kebijakan Dirjen
		Badilum berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal
		17 April 2024 Hal Pengisian Survei
		Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
19	Pengadilan Negeri Baturaja	LKE Manual tidak bisa diakses
		(dibuka)
20	Pengadilan Negeri	LKE menggunakan LKE dari aplikasi
	Batusangkar	pmpzi.mahkamahagung.go.id dan
		tidak ada penjelasan alasan
		pemberian nilai pada setiap sub
		komponen
21	Pengadilan Negeri	LKE Manual belum ada
	Bukittinggi	catatan/penjelasan pada setiap sub
		komponen
22	Pengadilan Negeri Cilacap	Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga
		tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen
		Badilum berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal
		17 April 2024 Hal Pengisian Survei
		Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
23	Pengadilan Negeri Demak	LKE Manual belum ada
	0	catatan/penjelasan pada setiap sub
		komponen
24	Pengadilan Negeri Gresik	• LKE Manual belum ada
		1

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan tidak ada tautan
		data dukung
		Periode survei (SPAK dan SPKP)
		Triwulan I Tahun 2024
25	Pengadilan Negeri Kab.	Periode survei (SPAK dan SPKP)
	Kediri	Triwulan I Tahun 2024 dan laporan
		survei diterbitkan 1 April 2024
		sehingga tidak sesuai dengan
		kebijakan Dirjen Badilum
		berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal
		17 April 2024 Hal Pengisian Survei
		Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
26	Pengadilan Negeri Karawang	LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan seluruh sub
		komponen diberi nilai sempurna
		sehingga nilai total 100
27	Pengadilan Negeri Kasongan	• LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan tidak ada tautan
		data dukung;
		Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP)
		sehingga belum sesuai dengan
		kebijakan Dirjen Badilum
		berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian





No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
28	Pengadilan Negeri Kayuagung	LKE PMPZI dan tidak ada tautan data dukung Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
29	Pengadilan Negeri Kisaran	Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Surveiy Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
30	Pengadilan Negeri Koba	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
31	Pengadilan Negeri Kota Agung	 LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id. Periode survei (SPAK dan SPKP) Triwulan I Tahun 2024 dan laporan survei diterbitkan Maret 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal
		Pengisian Surveiy Mandiri dan
		Penilaian Evaluasi Mandiri Zona
		Integritas
32	Pengadilan Negeri Kotabumi	• LKE belum menggunakan format
		LKE Manual tetapi menggunakan
		LKE dari aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id.
		Tidak ada laporan SPKP dan SPAK
33	Pengadilan Negeri	LKE Manual belum ada
	Kotamobagu	catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen
34	Pengadilan Negeri Kuala	• LKE menggunakan LKE dari
	Kapuas	aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id dan
		tidak ada penjelasan alasan
		pemberian nilai pada setiap sub
		komponen;
		 Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP)
		sehingga tidak sesuai dengan
		kebijakan Dirjen Badilum
		berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Surveiy Mandiri dan Penilaian
		Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
35	Pengadilan Negeri Kuala	• LKE menggunakan LKE dari
	Kurun	aplikasi
	9.	pmpzi.mahkamahagung.go.id dan
		tidak ada penjelasan alasan
		pemberian nilai pada setiap sub
		komponen;

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Periode survei (SPAK dan SPKP)
		Triwulan I Tahun 2024
36	Pengadilan Negeri Kuningan	LKE PMPZI tanpa ada penjelasan
¥.		alasan pemberian nilai pada setiap
		sub komponen;
		• Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP)
		sehingga tidak sesuai dengan
		kebijakan Dirjen Badilum
		berdasarkan surat Nomor
		1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian
		Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
37	Pengadilan Negeri Labuha	LKE Manual belum ada
		catatan/penjelasan/keterangan
	×.	diberikannya nilai pada setiap sub
38	Pengadilan Negeri Lahat	komponen LKE Manual belum ada
30	rengaunan Negeri Lanat	catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		l komponen dan tidak ada tautan data l
		komponen dan tidak ada tautan data dukung
39	Pengadilan Negeri Lembata	dukung
39	Pengadilan Negeri Lembata	dukung • LKE Manual belum ada
39	Pengadilan Negeri Lembata	dukungLKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan
39	Pengadilan Negeri Lembata	dukung • LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub
39	Pengadilan Negeri Lembata	dukung • LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan
39	Pengadilan Negeri Lembata	dukung • LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub
39	Pengadilan Negeri Lembata	 dukung LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
39	Pengadilan Negeri Lembata	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung Tidak ada Laporan Survei Persepsi
39	Pengadilan Negeri Lembata	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)
39	Pengadilan Negeri Lembata	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan
39	Pengadilan Negeri Lembata	 LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Survei Mandiri dan Penilaian
		Evaluasi Mandiri Zona Integritas
40	Pengadilan Negeri	LKE Manual belum ada
	Lhoksukon	catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan tidak ada tautan data
		dukung
41	Pengadilan Negeri Liwa	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; Tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian
42	Pengadilan Negeri Magetan	Evaluasi Mandiri Zona Integritas LKE Manual belum ada
72	Tengaunan Negeri Magetan	catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
43	Pengadilan Negeri	LKE Manual, namun tidak ada
	Majalengka	catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen.
44	Pengadilan Negeri	Tidak ada laporan Survei Persepsi
	Marabahan	Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
45	Pengadilan Negeri Marisa	LKE PMPZI tanpa ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen;

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
46	Pengadilan Negeri Masohi	Laporan Survei (SPAK dan SPKP) disahkan April 2024 sehingga tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat Nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas LKE Manual, namun tidak ada
		catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen; Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas. Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).
47	Pengadilan Negeri Mataram	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sub komponen.
48	Pengadilan Negeri Mempawah	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.
49	Pengadilan Negeri Menggala	LKE Manual, namun tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada setiap sub komponen.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		Survei dilaksanakan tidak sesua dengan kebijakan Dirjen Badilun berdasarkan surat nomo 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas Periode Survei Triwulan I Tahun 2024 dan tidak ada Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
50	Pengadilan Negeri Mentok	(SPKP). LKE Manual namun belum terdapa
	2 Ougument Progett Motitor	catatan atau penjelasan keterangar pada setiap sub area.
51	Pengadilan Negeri Metro	 LKE Manual, namun pada Area Pengungkit (Reform) dan Area Hasi tidak ada catatan/penjelasan/keterangan diberikan nilai pada sub setiap sul area tersebut Survei dilaksanakan tidak sesua dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomo 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisiar Survei Mandiri dan Penilaiar Evaluasi Mandiri Zona Integritas Periode Survei Triwulan I Tahur 2024 dan tidak ada Laporan Surve Persepsi Kualitas Pelayanar (SPKP).
52	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	LKE Manual belum ada catatan penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sul

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		SPKP dan SPAK hanya berupa tampilan website dan ringkasan laporan yang tidak lengkap Survei tidak sesuai format kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas (hanya dokumen tampilan nilai di website)
53	Pengadilan Negeri Padang	LKE Manual belum ada
	Panjang	catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen
54	Pengadilan Negeri	LKE belum menggunakan format LKE
	Palangkaraya	Manual tetapi menggunakan LKE dari
		aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id
		dan tidak ada penjelasan alasan
		pemberian nilai pada setiap sub
		komponen
55	Pengadilan Negeri	LKE belum menggunakan format LKE
	Pangkalan Balai	Manual tetapi menggunakan LKE dari
		aplikasi pmpzi,mahkamahagung.go.id
		dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub
		komponen
56	Pengadilan Negeri Paringin	LKE Manual, namun tidak ada
		catatan/penjelasan/keterangan
	Ţ.	diberikan nilai pada setiap sub
		komponen.
57	Pengadilan Negeri	LKE Manual belum ada catatan/
	Pasarwajo	penjelasan/keterangan diberikannya
		nilai pada setiap sub komponen

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
58	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen TLHP belum 100%
59	Pengadilan Negeri Penajam	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen.
60	Pengadilan Negeri Poso	Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas
61	Pengadilan Negeri Prabumulih	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
62	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	LKE Manual namun belum terdapat link eviden dan catatan/penjelasan keterangan pada setiap sub area
63	Pengadilan Negeri Purwokerto	 LKE Manual tidak sesuai format dan belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen; Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		SPKP dilaksanakan Triwulan II Tahun 2024 namun SPAK dilaksanakan Triwulan I Tahun 2024 dengan dasar survei yang tidak sesuai ketentuan. • TLHP belum 100%
64	Pengadilan Negeri Ranai /	LKE Manual belum ada
	Pengadilan Negeri Natuna	catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
65	Pengadilan Negeri Rantau	LKE tidak sesuai format
		Tidak ada laporan hasil survei
66	Pengadilan Negeri Rengat	Tidak ada laporan hasil Survei
	0	Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan
		pekan survei tidak sesuai kebijakan
		Dirjen Badilum berdasarkan surat
		nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024
		tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi
		Mandiri Zona Integritas
67	Pengadilan Negeri Sekayu	LKE belum menggunakan format LKE
		Manual tetapi menggunakan LKE dari
		aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id
		dan tidak ada penjelasan alasan
		pemberian nilai pada setiap sub
		komponen
68	Pengadilan Negeri	LKE Manual belum ada
	Semarapura	catatan/penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen dan tidak didukung
		dengan link eviden;
69	Pengadilan Negeri Sengkang	LKE Manual belum ada catatan/
		penjelasan/keterangan diberikannya
		nilai pada setiap sub komponen
70	Pengadilan Negeri Siak Sri	LKE Manual belum ada catatan/
	Indrapura	penjelasan/keterangan yang
L	<u> </u>	

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
- Park		diberikannya nilai pada setiap sub komponen serta belum didukung link eviden pada Area Reform dan Area Hasil
71	Pengadilan Negeri Sibolga	 Pelaksanaan Survei Tahun 2023 LKE Manual namun belum terdapat catatan/penjelasan pada setiap sub komponen
72	Pengadilan Negeri Simalungun	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan yang diberikannya nilai pada setiap sub komponen
73	Pengadilan Negeri Singaraja	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.
74	Pengadilan Negeri Sleman	Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
75	Pengadilan Negeri Tahuna	TLHP belum 100%
76	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen dan tidak ada tautan data dukung
77	Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun	LKE menggunakan LKE dari PMPZISPAK dan SPKP hanya berupa publikasi atas hasil survei
78	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	LKE tidak sesuai format Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
79	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	 LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan dan link eviden diberikannya nilai pada setiap sub komponen Tidak ada laporan hasil survei SPKP

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
80	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	LKE Manual belum ada catatan/penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen (tidak sesuai format)
81	Pengadilan Negeri Ternate	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada komponen Hasil TLHP belum 100%
82	Pengadilan Negeri Tilamuta	Laporan SPKP tidak sesuai format (Laporan SKM)
83	Pengadilan Negeri Tobelo	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen Pekan survei tidak sesuai kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor 1115/DJU/OT1.6/IV/2024 tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas TLHP belum 100%
84	Pengadilan Negeri Tondano	LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen
85	Pengadilan Negeri Waikabubak	 LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id dan tidak ada penjelasan alasan pemberian nilai pada setiap sub komponen Survei dilaksanakan tidak sesuai dengan kebijakan Dirjen Badilum berdasarkan surat nomor

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
	Annual hands of the state of th	1115/DJU/OT1.6/IV/2024
	ŷ.	tanggal 17 April 2024 Hal Pengisian
		Survei Mandiri dan Penilaian
	15	Evaluasi Mandiri Zona Integritas.
86	Pengadilan Negeri	LKE Manual belum ada catatan/
	Wonosobo	penjelasan/keterangan
		diberikannya nilai pada setiap sub
		komponen
		• TLHP belum 100%

2.a. Peradilan Agama - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Agama	Laporan Survei berupa Laporan
	Kupang	Survei Kepuasan Masyarakat dan
		Survei Persepsi Anti Korupsi,
		sehingga tidak ada Laporan Survei
		Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

2.b. Peradilan Agama - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Mahkamah Syar'iyah	Periode survei (SPAK dan SPKP)
	Lhoksukon	Triwulan I Tahun 2024
2	Mahkamah Syar'iyah Sigli	LKE Manual belum ada catatan/
		penjelasan/keterangan diberikannya
		nilai pada setiap sub komponen
3	Mahkamah Syar'iyah Tapak	• Laporan survei tidak sesuai edaran
	Tuan	Dirjen Badilag Nomor
		809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang
		Pengusulan Satuan Kerja Zona
		Integritas Di Lingkungan Peradilan
		Agama Tahun 2024.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
	V Programme Communication of the Communication of t	TLHP belum 100%
4	Pengadilan Agama Banggai	LKE tidak sesuai format
5	Pengadilan Agama	Tidak ada Laporan Survei Persepsi
	Banjarnegara	Kualitas Pelayanan (SPKP) sehingga
		laporan survei tidak sesuai edaran
		Dirjen Badilag Nomor
		809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang
		Pengusulan Satuan Kerja Zona
		Integritas Di Lingkungan Peradilan
		Agama Tahun 2024.
6	Pengadilan Agama Bantaeng	Periode survei (SPAK dan SPKP)
		Triwulan I Tahun 2024
7	Pengadilan Agama Barru	LKE belum diberikan nilai dan catatan/ penjelasan/ keterangan pada setiap sub komponen
		• Periode survei (SPAK dan SPKP)
		Triwulan I Tahun 2024, tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
8	Pengadilan Agama	• LKE belum menggunakan format
	Bengkalis	LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id Laporan survei tidak sesuai edaran
		Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang
		Pengusulan Satuan Kerja Zona
40		Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
9	Pengadilan Agama Kangean	Tidak ada Laporan Hasil Survei (SPAK
	1 cargaman agama mangcan	dan SPKP) sesuai format namun
		hanya informasi hasil survei

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
10	Pengadilan Agama Kisaran	Tidak ada dokumen Laporan SPAK
		dan SPKP, hanya ada Laporan SKM
		sehingga tidak sesuai format SE
		Menpan No 4 Tahun 2023 dan e-
		survey Dirjen Badilag
11	Pengadilan Agama Klaten	Periode survei (SPAK dan SPKP)
		Triwulan I Tahun 2024 (Survei
		diterbitkan tanggal 5 April 2024)
12	Pengadilan Agama Majene	LKE belum menggunakan format LKE
		Manual tetapi menggunakan LKE dari
		aplikasi
		pmpzi,mahkamahagung.go.id.
13	Pengadilan Agama Malili	Survey Triwulan I, namun di luar
		pekan survei sebagaimana surat
		edaran dari Dirjen Badilag (laporan
		tertanggal 28 Maret 2024)
14	Pengadilan Agama	Tidak terdapat Laporan Survei IPAK.
	Manokwari	
15	Pengadilan Agama Masohi	Pelaksanaan Survei IPAK tidak sesuai
		dengan pekan survei dari Badilag,
		pada survei IPKP tidak terdapat
		tanggal pelaksanaan survei. Namun
		kesuluruhan survei sudah
		melampirkan hasil survei Triwulan II.
16	Pengadilan Agama Muara	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada
	Enim	Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret),
		tidak sesuai edaran Dirjen Badilag
		Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024
		tentang Pengusulan Satuan Kerja
		Zona Integritas Di Lingkungan
		Peradilan Agama Tahun 2024.
17	Pengadilan Agama Natuna	Periode survei 2023 dan hanya
		memuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
	Pengadilan Agama Negara	Tidak ada Laporan Survei Persepsi
18	1 Cligatilali ligalila licgala	1
18	1 cirgatiiaii rigana regara	Kualitas Pelayanan (SPKP), dan

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		pada Triwulan I 2024 (Januari s.d.
	φ.	Maret) yang disahkan 28 Maret 2024,
		sehingga tidak sesuai edaran Dirjen
		Badilag Nomor
		809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang
		Pengusulan Satuan Kerja Zona
		Integritas Di Lingkungan Peradilan
		Agama Tahun 2024.
19	Pengadilan Agama Nganjuk	Tidak terdapat Laporan Survei (IPKP
		dan IPAK).
20	Pengadilan Agama	• LKE Manual namun tidak
	Pangkajene	dilengkapi dengan catatan
		penjelasan dan tautan data
		dukung;
		Laporan Survei Triwulan IV tahun
		2023.
21	Pengadilan Agama	LKE belum menggunakan format LKE
	Pangkalan Kerinci	Manual tetapi menggunakan LKE dari
		aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id.
22	Pengadilan Agama	• LKE Manual namun catatan
	Pariaman	penjelasan diisi tautan data
		dukung
		• Tidak ada Laporan Survei Persepsi
		Kualitas Pelayanan (SPKP), dan
		periode laporan survei (IKM dan
		IPK) pada Triwulan I 2024 (Januari
		s.d. Maret) yang disahkan 29 Maret
	g/	2024, sehingga tidak sesuai edaran
		Dirjen Badilag Nomor
		809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang
		Pengusulan Satuan Kerja Zona
		Integritas Di Lingkungan Peradilan
		Agama Tahun 2024.
23	Pengadilan Agama	Tidak terdapat Laporan Survei IPAK.
	Pasarwajo	

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
24	Pengadilan Agama Polewali	Catatan pada LKE tidak diisi
25	Pengadilan Agama Ponorogo	Link data dukung pada LKE tidak
		dapat diakses.
26	Pengadilan Agama	LKE Manual namun seluruh catatan
	Pontianak	penjelasan pada setiap sub komponen
		diisi "dokumen/eviden tersedia"
		sehingga tidak dapat dilakukan
		evaluasi lebih lanjut
27	Pengadilan Agama Sanggau	LKE yang dilampirkan LKE PMPZI
		bukan LKE Manual
28	Pengadilan Agama Selong	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada
		Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret),
		tidak sesuai edaran Dirjen Badilag
		Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024
		tentang Pengusulan Satuan Kerja
		Zona Integritas Di Lingkungan
		Peradilan Agama Tahun 2024.
29	Pengadilan Agama	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada
	Simalungun	Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret),
		tidak sesuai edaran Dirjen Badilag
		Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024
		tentang Pengusulan Satuan Kerja
		Zona Integritas Di Lingkungan
		Peradilan Agama Tahun 2024 karena
		surat pengantar tertanggal 28 Maret
		2024 dan tidak ada informasi terkait
		jadwal pelaksanaan survei.
30	Pengadilan Agama Sinjai	LKE yang dilampirkan LKE PMPZI
		bukan LKE Manual
31	Pengadilan Agama Sintang	LKE belum menggunakan format LKE
		Manual tetapi menggunakan LKE dari
		aplikasi
		pmpzi.mahkamahagung.go.id.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
32	Pengadilan Agama Soasio	LKE Manual namun tidak dilengkapi dengan catatan penjelasan dan tautan data dukung
33	Pengadilan Agama Soe	Catatan pada LKE tidak diisi
34	Pengadilan Agama Stabat	Tidak ada Laporan Survei Persepsi
	1	Kualitas Pelayanan (SPKP)
35	Pengadilan Agama Taliwang	Laporan Survei dokumen tidak ada dilampirkan.
36	Pengadilan Agama Tanah	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada
	Grogot	Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilag Nomor 809/DJA.1/OT1/IV/2024 tentang Pengusulan Satuan Kerja Zona Integritas Di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2024.
37	Pengadilan Agama Tanjung	• LKE Manual namun tidak
	Balai Karimun	dilengkapi dengan catatan penjelasan; • Tidak terdapat Laporan Survei.
38	Pengadilan Agama Tanjung Selor	LKE Manual namun seluruh Catatan/Keterangan/Penjelasan tidak terisi
39	Pengadilan Agama Tegal	Laporan Survei Triwulan IV tahun 2023
40	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Catatan pada LKE tidak diisi
41	Pengadilan Agama Watansoppeng	 LKE Manual belum ada catatan/ penjelasan/keterangan diberikannya nilai pada setiap sub komponen TLHP belum 100%
42	Pengadilan Agama Wates	LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id.

^{3.} Peradilan Militer - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	Catatan pada LKE tidak diisi/kosong
2	Pengadilan Militer I-04 Palembang	 LKE belum menggunakan format LKE Manual tetapi menggunakan LKE dari aplikasi pmpzi.mahkamahagung.go.id Tidak ada laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, namun terdapat Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
3	Pengadilan Militer I-07 Balikpapan	 LKE Manual namun tidak seluruh Catatan/Keterangan/Penjelasan terisi lengkap; Periode survei (IPKP dan IPAK) pada Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret), tidak sesuai edaran Dirjen Badilmiltun Nomor 1115/DJU/OT1.6./IV/2024 tentang Pengisian Survei Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas.

4.a. Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja		Catatan Evaluator				
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	•	diberik kompo Tidak Kualita	Mar n/pen xannya onen ada la	nual jelasar a nilai aporan Pelaya	belum n/ketera pada se Survei anan,	
			Masya	_			

4.b. Peradilan Tata Usaha Negara - Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator

1	Pengadilan Tata Usaha	LKE Manual namun tidak disertai	
	Negara Mataram	dengan catatan;	
2	Pengadilan Tata Usaha	TLHP belum 100%	
	Negara Palu		
3	Pengadilan Tata Usaha	Periode survei (IPKP dan IPAK) pada	
	Negara Pekanbaru	Triwulan I 2024 (Januari s.d. Maret),	
		tidak sesuai edaran Dirjen	
		Badilmiltun Nomor	
		1115/DJU/OT1.6./IV/2024 tentang	
		Pengisian Survei Mandiri dan	
		Penilaian Evaluasi Mandiri Zona	
		Integritas.	
4	Pengadilan Tata Usaha	LKE Manual namun tidak disertai	
	Negara Samarinda	dengan catatan dan tautan data	
		dukung tidak dapat diklik;	
5	Pengadilan Tata Usaha	LKE Manual namun tidak disertai	
	Negara Semarang	dengan catatan dan tautan	

C. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS PENILAIAN (*DESK EVALUATION*) – ANALISIS DOKUMEN LKE ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Lingkungan Peradilan Umum

1.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	Kriteria 1 dan Kriteria 2
2	Pengadilan Tinggi Palembang	Kriteria 1 dan Kriteria 2

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Negeri Baubau	Kriteria 1
2	Pengadilan Negeri Bireuen	Kriteria 2
3	Pengadilan Negeri Boyolali	Kriteria 1 dan Kriteria 2
4	Pengadilan Negeri Kupang	Kriteria 2
5	Pengadilan Negeri Padang	Kriteria 1
6	Pengadilan Negeri Pekalongan	Kriteria 1 dan Kriteria 2

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
7	Pengadilan Negeri Putussibau	Kriteria 2
8	Pengadilan Negeri Ambon	Kriteria 1 dan Kriteria 2
9	Pengadilan Negeri Blora	Kriteria 1 dan Kriteria 2
10	Pengadilan Negeri Bojonegoro	Kriteria 1 dan Kriteria 2
11	Pengadilan Negeri Bulukumba	Kriteria 1 dan Kriteria 2
12	Pengadilan Negeri Cianjur	Kriteria 1 dan Kriteria 2
13	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	Kriteria 1 dan Kriteria 2
14	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
15	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	Kriteria 1 dan Kriteria 2
16	Pengadilan Negeri Kandangan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
17	Pengadilan Negeri Ketapang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
18	Pengadilan Negeri Manado	Kriteria 1 dan Kriteria 2
19	Pengadilan Negeri Ngabang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
20	Pengadilan Negeri Probolinggo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
21	Pengadilan Negeri Sei Rampah	Kriteria 1 dan Kriteria 2
22	Pengadilan Negeri Stabat	Kriteria 1 dan Kriteria 2
23	Pengadilan Negeri Tarakan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
24	Pengadilan Negeri Wonogiri	Kriteria 1 dan Kriteria 2

2. Lingkungan Peradilan Agama

2.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tinggi Agama Manado	Kriteria 1 dan Kriteria 2

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	Kriteria 1
2	Mahkamah Syar'iyah Jantho	Kriteria 1 dan Kriteria 2
3	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Kriteria 1 dan Kriteria 2
4	Pengadilan Agama Ampana	Kriteria 1 dan Kriteria 2
5	Pengadilan Agama Bajawa	Kriteria 1 dan Kriteria 2
6	Pengadilan Agama Balikpapan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
7	Pengadilan Agama Bangkalan	Kriteria 1 dan Kriteria 2

9 Pengadilan Agama Baubau Kriteria 1 dan Kriteria 2 10 Pengadilan Agama Bawean Kriteria 1 dan Kriteria 2 11 Pengadilan Agama Gedong Tataan Kriteria 1 dan Kriteria 2 12 Pengadilan Agama Koto Baru Kriteria 1 dan Kriteria 2 13 Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 14 Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 15 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 16 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 17 Pengadilan Agama Kupang Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Manna Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tembilahan Kr	No	Nama Unit Kerja	Kriteria
10 Pengadilan Agama Bawean Kriteria 1 dan Kriteria 2 11 Pengadilan Agama Gedong Tataan Kriteria 1 dan Kriteria 2 12 Pengadilan Agama Koto Baru Kriteria 1 dan Kriteria 2 13 Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 14 Pengadilan Agama Kuala Kriteria 1 dan Kriteria 2 15 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 16 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 17 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Manaa Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Mara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Mara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadila	8	Pengadilan Agama Bangkinang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
11 Pengadilan Agama Gedong Tataan Kriteria 1 dan Kriteria 2 12 Pengadilan Agama Koto Baru Kriteria 1 dan Kriteria 2 13 Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 14 Pengadilan Agama Kuala Kriteria 1 dan Kriteria 2 15 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 16 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 17 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Manaa Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Nabire Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2	9	Pengadilan Agama Baubau	Kriteria 1 dan Kriteria 2
12 Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 13 Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 14 Pembauang Kriteria 1 dan Kriteria 2 15 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 dan Kriteria 2 16 Pengadilan Agama Kupang Kriteria 1 dan Kriteria 2 17 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Manama Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Sonog Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tuhan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuhan Kriteria 1 dan Kriteria 2	10	Pengadilan Agama Bawean	Kriteria 1 dan Kriteria 2
Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Kuala Pembuang Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rembuang Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rembadilan Agama Kudus Kriteria 1 Pengadilan Agama Kupang Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Manama Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	11	Pengadilan Agama Gedong Tataan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
Pengadilan Agama Kuala Pembuang 15 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 16 Pengadilan Agama Kudus Kriteria 1 17 Pengadilan Agama Kupang Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manna Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Manna Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	12	Pengadilan Agama Koto Baru	Kriteria 1 dan Kriteria 2
14 Pembuang 15 Pengadilan Agama Kudus 16 Pengadilan Agama Kupang 17 Pengadilan Agama Manado 18 Pengadilan Agama Manado 19 Pengadilan Agama Manaa 19 Pengadilan Agama Masamba 10 Pengadilan Agama Masamba 11 Pengadilan Agama Masamba 12 Pengadilan Agama Masamba 13 Pengadilan Agama Merauke 14 Pengadilan Agama Muara Tebo 15 Pengadilan Agama Muara Tebo 16 Pengadilan Agama Palangkaraya 17 Pengadilan Agama Palangkaraya 18 Pengadilan Agama Palangkaraya 19 Pengadilan Agama Palangkaraya 20 Pengadilan Agama Palangkaraya 21 Pengadilan Agama Palangkaraya 22 Pengadilan Agama Palangkaraya 23 Pengadilan Agama Palopo 24 Pengadilan Agama Pangkalan Balai 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung 27 Pengadilan Agama Rengat 28 Pengadilan Agama Rengat 29 Pengadilan Agama Sengeti 30 Pengadilan Agama Sengeti 31 Pengadilan Agama Sengeti 32 Pengadilan Agama Sorong 33 Pengadilan Agama Sungailiat 34 Pengadilan Agama Sungailiat 35 Pengadilan Agama Sungailiat 36 Pengadilan Agama Tanjung Pandan 37 Pengadilan Agama Tanjung Pati 38 Pengadilan Agama Ternate 39 Pengadilan Agama Ternate 30 Pengadilan Agama Tondano 30 Pengadilan Agama Tondano 31 Pengadilan Agama Tondano 32 Pengadilan Agama Tuban 33 Pengadilan Agama Tuban 34 Pengadilan Agama Tuban 35 Pengadilan Agama Tuban 36 Pengadilan Agama Tuban 37 Pengadilan Agama Tuban 38 Pengadilan Agama Tuban 39 Pengadilan Agama Tulungagung 39 Pengadilan Agama Tulungagung 30 Kriteria 1 dan Kriteria 2	13	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	Kriteria 1 dan Kriteria 2
16 Pengadilan Agama Kupang Kriteria 1 dan Kriteria 2 17 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manna Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Nabire Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2	14		Kriteria 1 dan Kriteria 2
17 Pengadilan Agama Manado Kriteria 1 dan Kriteria 2 18 Pengadilan Agama Manna Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Nabire Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	15	Pengadilan Agama Kudus	Kriteria 1
18 Pengadilan Agama Manna Kriteria 1 dan Kriteria 2 19 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Nabire Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	16	Pengadilan Agama Kupang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
19 Pengadilan Agama Masamba Kriteria 1 dan Kriteria 2 20 Pengadilan Agama Merauke Kriteria 1 dan Kriteria 2 21 Pengadilan Agama Muara Tebo Kriteria 1 dan Kriteria 2 22 Pengadilan Agama Nabire Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Temate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2	17	Pengadilan Agama Manado	Kriteria 1 dan Kriteria 2
20Pengadilan Agama MeraukeKriteria 1 dan Kriteria 221Pengadilan Agama Muara TeboKriteria 1 dan Kriteria 222Pengadilan Agama NabireKriteria 1 dan Kriteria 223Pengadilan Agama PalangkarayaKriteria 1 dan Kriteria 224Pengadilan Agama PalopoKriteria 1 dan Kriteria 225Pengadilan Agama Pangkalan BalaiKriteria 1 dan Kriteria 226Pengadilan Agama RangkasbitungKriteria 1 dan Kriteria 227Pengadilan Agama RengatKriteria 1 dan Kriteria 228Pengadilan Agama RumbiaKriteria 1 dan Kriteria 229Pengadilan Agama SengetiKriteria 1 dan Kriteria 230Pengadilan Agama SingkawangKriteria 1 dan Kriteria 231Pengadilan Agama SungailiatKriteria 1 dan Kriteria 232Pengadilan Agama SungailiatKriteria 1 dan Kriteria 233Pengadilan Agama Tanjung PandanKriteria 1 dan Kriteria 234Pengadilan Agama Tanjung PatiKriteria 1 dan Kriteria 235Pengadilan Agama TembilahanKriteria 1 dan Kriteria 236Pengadilan Agama TembilahanKriteria 1 dan Kriteria 237Pengadilan Agama TemateKriteria 1 dan Kriteria 238Pengadilan Agama TondanoKriteria 1 dan Kriteria 239Pengadilan Agama TulungagungKriteria 1 dan Kriteria 240Pengadilan Agama TulungagungKriteria 1 dan Kriteria 2	18	Pengadilan Agama Manna	Kriteria 1 dan Kriteria 2
21Pengadilan Agama Muara TeboKriteria 1 dan Kriteria 222Pengadilan Agama NabireKriteria 1 dan Kriteria 223Pengadilan Agama PalangkarayaKriteria 1 dan Kriteria 224Pengadilan Agama PalopoKriteria 1 dan Kriteria 225Pengadilan Agama Pangkalan BalaiKriteria 1 dan Kriteria 226Pengadilan Agama RangkasbitungKriteria 1 dan Kriteria 227Pengadilan Agama RengatKriteria 1 dan Kriteria 228Pengadilan Agama RumbiaKriteria 1 dan Kriteria 229Pengadilan Agama SengetiKriteria 1 dan Kriteria 230Pengadilan Agama SingkawangKriteria 1 dan Kriteria 231Pengadilan Agama SorongKriteria 1 dan Kriteria 232Pengadilan Agama SungailiatKriteria 1 dan Kriteria 233Pengadilan Agama SuwawaKriteria 1 dan Kriteria 234Pengadilan Agama Tanjung PandanKriteria 1 dan Kriteria 235Pengadilan Agama Tanjung PatiKriteria 1 dan Kriteria 236Pengadilan Agama TembilahanKriteria 1 dan Kriteria 237Pengadilan Agama TemateKriteria 1 dan Kriteria 238Pengadilan Agama TondanoKriteria 1 dan Kriteria 239Pengadilan Agama TulungagungKriteria 1 dan Kriteria 240Pengadilan Agama TulungagungKriteria 1 dan Kriteria 2	19	Pengadilan Agama Masamba	Kriteria 1 dan Kriteria 2
22 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	20	Pengadilan Agama Merauke	Kriteria 1 dan Kriteria 2
23 Pengadilan Agama Palangkaraya Kriteria 1 dan Kriteria 2 24 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	21	Pengadilan Agama Muara Tebo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
24 Pengadilan Agama Palopo Kriteria 1 dan Kriteria 2 25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	22	Pengadilan Agama Nabire	Kriteria 1 dan Kriteria 2
25 Pengadilan Agama Pangkalan Balai Kriteria 1 dan Kriteria 2 26 Pengadilan Agama Rangkasbitung Kriteria 1 dan Kriteria 2 27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	23	Pengadilan Agama Palangkaraya	Kriteria 1 dan Kriteria 2
26Pengadilan Agama RangkasbitungKriteria 1 dan Kriteria 227Pengadilan Agama RengatKriteria 1 dan Kriteria 228Pengadilan Agama RumbiaKriteria 1 dan Kriteria 229Pengadilan Agama SengetiKriteria 1 dan Kriteria 230Pengadilan Agama SingkawangKriteria 1 dan Kriteria 231Pengadilan Agama SorongKriteria 1 dan Kriteria 232Pengadilan Agama SungailiatKriteria 1 dan Kriteria 233Pengadilan Agama SuwawaKriteria 1 dan Kriteria 234Pengadilan Agama Tanjung PandanKriteria 1 dan Kriteria 235Pengadilan Agama Tanjung PatiKriteria 1 dan Kriteria 236Pengadilan Agama TembilahanKriteria 1 dan Kriteria 237Pengadilan Agama TemateKriteria 1 dan Kriteria 238Pengadilan Agama TondanoKriteria 1 dan Kriteria 239Pengadilan Agama TulungagungKriteria 1 dan Kriteria 240Pengadilan Agama TulungagungKriteria 1 dan Kriteria 2	24	Pengadilan Agama Palopo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
27 Pengadilan Agama Rengat Kriteria 1 dan Kriteria 2 28 Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	25	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	Kriteria 1 dan Kriteria 2
Pengadilan Agama Rumbia Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Pengadilan Agama Tanjung Pati Fengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 Kriteria 1 dan Kriteria 2 Rengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2	26	Pengadilan Agama Rangkasbitung	Kriteria 1 dan Kriteria 2
29 Pengadilan Agama Sengeti Kriteria 1 dan Kriteria 2 30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2	27	Pengadilan Agama Rengat	Kriteria 1 dan Kriteria 2
30 Pengadilan Agama Singkawang Kriteria 1 dan Kriteria 2 31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	28	Pengadilan Agama Rumbia	Kriteria 1 dan Kriteria 2
31 Pengadilan Agama Sorong Kriteria 1 dan Kriteria 2 32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	29	Pengadilan Agama Sengeti	Kriteria 1 dan Kriteria 2
32 Pengadilan Agama Sungailiat Kriteria 1 dan Kriteria 2 33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	30	Pengadilan Agama Singkawang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
33 Pengadilan Agama Suwawa Kriteria 1 dan Kriteria 2 34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	31	Pengadilan Agama Sorong	Kriteria 1 dan Kriteria 2
34 Pengadilan Agama Tanjung Pandan Kriteria 1 dan Kriteria 2 35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	32	Pengadilan Agama Sungailiat	Kriteria 1 dan Kriteria 2
35 Pengadilan Agama Tanjung Pati Kriteria 1 dan Kriteria 2 36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	33	Pengadilan Agama Suwawa	Kriteria 1 dan Kriteria 2
36 Pengadilan Agama Tembilahan Kriteria 1 dan Kriteria 2 37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	34	Pengadilan Agama Tanjung Pandan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
37 Pengadilan Agama Ternate Kriteria 1 dan Kriteria 2 38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	35	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kriteria 1 dan Kriteria 2
38 Pengadilan Agama Tondano Kriteria 1 dan Kriteria 2 39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	36	Pengadilan Agama Tembilahan	Kriteria 1 dan Kriteria 2
39 Pengadilan Agama Tuban Kriteria 1 dan Kriteria 2 40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	37	Pengadilan Agama Ternate	Kriteria 1 dan Kriteria 2
40 Pengadilan Agama Tulungagung Kriteria 1 dan Kriteria 2	38		Kriteria 1 dan Kriteria 2
	39	Pengadilan Agama Tuban	Kriteria 1 dan Kriteria 2
41 Pengadilan Agama Wonogiri Kriteria 1 dan Kriteria 2	40		Kriteria 1 dan Kriteria 2
	41	Pengadilan Agama Wonogiri	Kriteria 1 dan Kriteria 2

3. Lingkungan Peradilan Militer

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Militer I-03 Padang	Kriteria 1 dan Kriteria 2

4. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

4.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha	Kriteria 1 dan Kriteria 2
1	Negara Makassar	Mitcha i dan Mitcha 2

4.b. Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Kriteria
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Kriteria 1 dan Kriteria 2
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	Kriteria 1 dan Kriteria 2
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
4	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Kriteria 1 dan Kriteria 2
5	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Kriteria 1 dan Kriteria 2

Keterangan Kriteria Penilaian

No	Kriteria	Keterangan Kriteria	Rincian
1	Kriteria 1	Catatan/Penjelas	Catatan/Penjelasan pada LKE tidak
		an LKE	sesuai/tidak lengkap dan/atau tidak
		:	relevan dengan data dukung yang
			dilampirkan sehingga mempengaruhi
			nilai akhir dan tidak memenuhi syarat
			penetapan unit kerja berpredikat
			menuju WBK

No	Kriteria	Keterangan Kriteria	Rincian
2	Kriteria 2	Lampiran Data Dukung	Tautan/link Data Dukung tidak dapat diakses/tidak lengkap/tidak valid dan/atau tidak relevan dengan penjelasan yang diuraikan pada LKE sehingga mempengaruhi nilai akhir dan tidak memenuhi syarat penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK

D. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS PENILAIAN (*DESK EVALUATION*) – WAWANCARA DAN VERIFIKASI LAPANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Unit Eselon 1

No	Nama Unit Kerja		Catatan Evaluator
1	Badan Strategi	•	Terdapat komitmen Pimpinan dan
	Kebijakan dan		seluruh aparatur yang tergambar
	Pendidikan dan		pada hasil desk evaluation –
	Pelatihan Hukum dan		wawancara dan verifikasi lapangan;
	Peradilan	•	Kinerja tahun 2023 telah tercapai;
			Peningkatan Kualitas Layanan telah
			diupayakan melalui sejumlah
			inovasi layanan yang baru dimulai di
			tahun 2024 dan belum optimal.
			Terdapat peristiwa yang berdampak
			pada penurunan integritas aparatur
			yang dibuktikan dengan adanya
			penjatuhan Hukuman Disiplin (HD):
			Tahun 2023: HD Berat (1); HD
			Ringan (1)
			Tahun 2024 : HD Ringan (1)

2. Lingkungan Peradilan Umum

2.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja		Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi	•	Terdapat komitmen Pimpinan dan
	Banda Aceh		seluruh aparatur yang tergambar
			pada hasil desk evaluation –
			wawancara dan verifikasi lapangan;
		0	Kinerja tahun 2023 telah tercapai;
		6	Kualitas pelayanan secara umum
			baik, namun terhadap penanganan
			pengaduan belum sesuai dengan
			ketentuan yang berlaku;
		•	Inovasi yang diimplementasikan
			belum dilakukan monitoring dan
			evaluasi secara berkala.
2	Pengadilan Tinggi	0	Terdapat komitmen Pimpinan dan
	Banten		seluruh aparatur yang tergambar
			pada hasil desk evaluation –
1			wawancara dan verifikasi lapangan;
		0	Kinerja tahun 2023 telah tercapai;
			Inovasi tahun 2023 tidak berjalan.
			Inovasi yang menjadi unggulan
			"SiPerad" dihasilkan tahun 2024
			masih dalam pengembangan dan
			sampai saat ini masih dalam proses
			penyelesaian, baru digunakan oleh 1
			pengguna;
		0	Inovasi Siperi dilaunching
			September 2024, sudah digunakan
			oleh 16 pengguna
		0	Aplikasi Wasbidda merupakan
			inovasi masih dalam pengembangan
			belum dapat digunakan.

No	Nama Unit Kerja	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Negeri Banjarbaru	0	Terdapat komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur yang tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara, namun tidak tergambar saat verifikasi lapangan; Data capaian kinerja tidak memadai Sasaran Strategis 1 dinyatakan dalam LKjIP tidak tercapai 100%; Terdapat aktivitas di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berpotensi mengganggu integritas hakim dan aparatur.
2	Pengadilan Negeri Bengkalis	0 0	Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; Pengendalian internal yang belum efektif diterapkan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Bengkalis yang berpotensi mengganggu integritas hakim dan aparatur.
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	0	Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Informasi Capaian Kinerja pada LKjIP tidak memadai. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja belum menjadi perhatian utama

•	dalam pembangunan Zona Integritas. Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan;
6	Pengendalian internal yang belum efektif diterapkan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berpotensi mengganggu integritas hakim dan aparatur.
	Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur yang dibuktikan dengan adanya Pemberian Hukuman Disiplin (HD): Tahun 2023: HD Ringan (3); HD
	Sedang (4); HD Berat (1) Tahun 2024: HD Sedang (1)

3. Lingkungan Peradilan Agama

3.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	Komitmen Pimpinan dan seluru aparatur tergambar pada hasil des evaluation – wawancara da
		verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai;
		Peningkatan Kualitas Layanan tela diupayakan melalui sejumla
		inovasi layanan dan tela diimplementasikan;
		Dalam periode pembangunan zon integritas terindikasi adanya prakti
		pungutan tidak sesuai ketentuan.

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator		
1	Pengadilan Agama	• Komitmen Pimpinan dan seluruh		
	Ambarawa	aparatur tergambar pada hasil <i>desk</i>		
		evaluation – wawancara dan		
		verifikasi lapangan;		
		Kinerja tahun 2023 telah tercapai;		
		Peningkatan Kualitas Layanan telah		
		diupayakan melalui sejumlah		
		inovasi layanan dan telah		
		diimplementasikan;		
		• Tidak terdapat peristiwa yang		
		berdampak pada penurunan		
		integritas hakim dan aparatur.		
		Pada DE-Wawancara ditemukan		
		Keluhan pada Google Review yang		
		belum direspons terkait keluhan		
		layanan yang kemudian ditindaklanjuti		
		oleh Satuan Kerja. Pada periode pembangunan zona		
		integritas terdapat beberapa laporan		
		pengaduan layanan kepada Badan		
		Pengawasan yakni tahun 2024		
		sebanyak 7 (tujuh) pengaduan. Ata		
		seluruh pengaduan tersebut telah		
		ditindaklanjuti melalui klarifikasi.		
2	Pengadilan Agama	Komitmen Pimpinan dan seluruh		
	Garut	aparatur tergambar pada hasil desk		
		evaluation – wawancara dan		
		verifikasi lapangan;		
		Kinerja tahun 2023 telah tercapai;		
		Peningkatan kualitas layanan telah		
		diupayakan melalui sejumlah		
		inovasi layanan, namun saat		
		dilakukan pengujian terdapat		
		kondisi inovasi antrian sidang hanya		
		menggunakan 1 (satu) bahasa yakni		

	- 4	43 -
No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
A Section Control		Bahasa Indonesia (tidak sesuai dengan informasi inovasi tesebut). Inovasi antrian tersebut menggunakan manual book unit kerja lain sehingga tidak dapat diyakini orisinalitasnya; Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan/atau aparatur.
3	Pengadilan Agama Jayapura	 Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan kualitas layanan belum memadai yakni terkait layanan PTSP dan Posbakum; Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.
4	Pengadilan Agama Padang	 Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; Terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur, yakni terdapat Hukuman Disiplin Ringan Tahun 2023 untuk 3 orang Hakim

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
5	Pengadilan Agama Palu	 Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; Pengukuran Kinerja tidak memadai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplementasikan; Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan
6	Pengadilan Agama Prabumulih	 integritas hakim dan aparatur. Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Kualitas Layanan belum memadai, hasil survei belum ditindaklanjuti serta sarana dan prasarana tidak dilakukan pemeliharaan secara memadai; Tidak terdapat peristiwa yang berdampak pada penurunan integritas hakim dan aparatur.

E. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS CLEARANCE PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Lingkungan Peradilan Agama

No	Nama Unit Kerja	Hasil Clearance
1	Pengadilan Agama Bukittinggi	Tidak Lulus <i>Clearance</i> ORI

2. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Nama Unit Kerja	Hasil Clearance
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	Tidak Lulus Clearance KPK
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	Tidak Lulus <i>Clearance</i> KPK

F. DAFTAR UNIT KERJA YANG DINYATAKAN LULUS PENILAIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

Lingkungan Peradilan Umum Pengadilan Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja	Nilai		Catatan Evaluator		Rekomendasi
1	Pengadilan	Pengungkit:	0	Komitmen	0	Mengoptimalkan
	Negeri Pati	46,13		Pimpinan		internalisasi atas
		Hasil: 36,93		dan seluruh		pembangunan ZI
		IPAK: 3,99		aparatur		yang sudah
		IPKP: 3,88		tergambar		dilakukan dan
		Nilai Total:		pada hasil		meningkatkan
		83,06		desk		pengembangan
				evaluation –		manajemen
				wawancara		risiko yang lebih
				dan verifikasi		dapat
				lapangan;		menghilangkan
			0	Kinerja		kemungkinan
				tahun 2023		terjadinya risiko
	100			telah		kegagalan
				tercapai;		pencapaian
			0	Peningkatan		kinerja dan
				Kualitas		penyimpangan
				Layanan		integritas
				telah		dengan
				diupayakan		penyempurnaan
				melalui		peta risiko dan
				sejumlah		mitigasi risiko
				inovasi		secara
			Manage of the Control	layanan dan		berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			telah	khususnya
			diimplement	terkait risiko
			asikan;	integritas.
			• Tidak	Mengembangkan
			terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	menjadi
			integritas	percontohan,
			hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur	dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja
				 Melakukan
				sosialisasi
				kepada
				stakeholder/pen
				gguna layanan
				atas inovasi yang
				ada sehingga
				dapat diketahui
				dan manfaat
				atas inovasi
	The second secon			tersebut dapat
				dirasakan dan
				memberikan
				kemudahan bagi
				stakeholder/pen

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			Section 1 to 1	gguna layanan
	2.			Melakukan
				monitoring dan
				evaluasi atas
	,			inovasi sehingga
				dapat menjadi
				bahan koreksi
				dan perbaikan
				serta
				pengembangan
				inovasi kedepan.

2. Lingkungan Peradilan Agama

2.a. Pengadilan Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Rekomendasi Evaluator
1	Pengadilan	Pengungkit:	Komitmen Meningkatkan
	Tinggi Agama	46,13	Pimpinan kualitas
	Jambi	Hasil: 38,71	dan seluruh implementasi
		IPAK: 4	aparatur SPBE sehingga
		IPKP: 3,99	tergambar mampu
		Nilai Total:	pada hasil mendorong
		84,83	desk terjadinya
	ė		evaluation – percepatan
	× .		wawancara dalam pelayanar
			dan verifikasi publik yang lebih
			lapangan; efisien
			Kinerja Mengembangkar
			tahun 2023 inovasi yang
			telah unggul
			tercapai; dibandingkan
			• Peningkatan unit-unit kerja
			Kualitas lain, layal
			Layanan dijadikan
			telah percontohan,

	diupayakan berkelanjutan,
	melalui dan secara nyata
	sejumlah efektif
	inovasi meningkatkan
	layanan dan pencapaian
	telah kinerja utama
	diimplement serta kualitas
=	asikan; pelayanan unit
	• Tidak kerja;
	terdapat • Meningkatkan
	peristiwa kerja sama
	yang dengan
	berdampak stakeholder yang
	pada terkait dengan
	penurunan core bisnis
	integritas pengadilan
	hakim dan dalam rangka
	aparatur pencapaian
	kinerja yang
	lebih baik,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
1	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	 Meningkatkan
	Agama	47,29	Pimpinan	kualitas
	Andoolo	Hasil: 36,93	dan seluruh	implementasi
		IPAK: 3,94	aparatur	SPBE sehingga
		IPKP: 3,93	tergambar	mampu
		Nilai Total:	pada hasil	mendorong
		84,22	desk	terjadinya
	1		evaluation –	percepatan
			wawancara	dalam pelayanan
			dan verifikasi	publik yang lebih
			lapangan;	efisien
			Kinerja	Mengembangkan
			tahun 2023	inovasi yang

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
	Holja		telah	unggul
			tercapai;	
			- '	dibandingkan unit-unit kerja
			• Peningkatan	
			Kualitas	lain, layak
			Layanan	dijadikan
			telah	percontohan,
			diupayakan	berkelanjutan,
			melalui	dan secara nyata
			sejumlah	efektif
	:		inovasi	meningkatkan
			layanan dan	
			telah	kinerja utama
			diimplement	serta kualitas
			asikan;	pelayanan unit
			Tidak	kerja;
			terdapat	Meningkatkan
			peristiwa	kerjasama
			yang	dengan
			berdampak	stakeholder yang
			pada	terkait dengan
			penurunan	core bisnis
			integritas	pengadilan
			hakim dan	dalam rangka
			aparatur.	pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik
2	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	Menyesuaikan
	Agama Arga	51,68	Pimpinan	kebijakan
	Makmur	Hasil: 38,44	dan seluruh	penanganan dan
		IPAK: 3,98	aparatur	pelaporan
		IPKP: 3,95	tergambar	gratifikasi
		Nilai Total:	pada hasil	dengan SK
		90,12	desk	Kabawas Nomor
			evaluation -	28 Tahun 2021
			wawancara	Mengoptimalkan

No	Nama Unit	Nilai	Catatan	Rekomendasi
NO	Kerja	miai	Evaluator	Rekomendasi
			dan verifikasi	internalisasi atas
			lapangan;	pembangunan ZI
			• Kinerja	yang sudah
			tahun 2023	dilakukan dan
			telah	meningkatkan
			tercapai;	pengembangan
			Peningkatan	manajemen
			Kualitas	risiko yang lebih
			Layanan	dapat
			telah	menghilangkan
			diupayakan	kemungkinan
			melalui	terjadinya risiko
			sejumlah	kegagalan
			inovasi	pencapaian
			layanan dan	kinerja dan
			telah	penyimpangan
444			diimplement	integritas
			asikan;	dengan
			• Tidak	penyempurnaan
			terdapat	peta risiko dan
			peristiwa	mitigasi risiko
			yang	secara
			berdampak	berkelanjutan,
			pada	khususnya
:			penurunan	terkait risiko
			integritas	integritas.
¥:			hakim dan	• Mengembangkan
			aparatur.	inovasi yang
:				unggul
				dibandingkan
				unit-unit kerja
				lain, layak
				dijadikan
				percontohan,
				berkelanjutan,

D.T.	Nama Unit	1	Catatan	
No	Kerja	Nilai	Evaluator	Rekomendasi
				dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
3	Pengadilan Agama Atambua	Pengungkit: 44,78 Hasil: 35,66 IPAK: 3,79 IPKP: 3,79 Nilai Total: 80,44	 Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation - wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan 	 Menyesuaikan kebijakan penanganan dan pelaporan gratifikasi dengan SK Kabawas Nomor 28 Tahun 2021 Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
	The state of the s		Kualitas	risiko yang lebih
			Layanan	dapat
			telah	menghilangkan
			diupayakan	kemungkinan
			melalui	terjadinya risiko
			sejumlah	kegagalan
			inovasi	pencapaian
			layanan dan	kinerja dan
			telah	penyimpangan
			diimplement	integritas
			asikan;	dengan
			• Tidak	penyempurnaan
			terdapat	peta risiko dan
			peristiwa	mitigasi risiko
			yang	secara
			berdampak	berkelanjutan,
			pada	khususnya
			penurunan	terkait risiko
			integritas	integritas.
	A		hakim dan •	Mengembangkan
			aparatur.	inovasi yang
				unggul
				dibandingkan
				unit-unit kerja
				lain, layak
				dijadikan
				percontohan,
				berkelanjutan,
				dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				kerja; Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
4	Pengadilan Agama Badung	Pengungkit: 44,44 Hasil: 37,11 IPAK: 3,97 IPKP: 3,94 Nilai Total: 81,54	 Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation - wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah 	Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko

No	Nama Unit	Nilai	Catatan	Rekomendasi
	Kerja		Evaluator	
			layanan dan	berkelanjutan,
			telah	khususnya
			diimplement	terkait risiko
			asikan;	integritas.
			• Tidak	Mengembangkan
			terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	dijadikan
			integritas	percontohan,
	i		hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur.	dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				Meningkatkan
				kerjasama
				dengan
				stakeholder yang
				terkait dengan
				core bisnis
				pengadilan
				dalam rangka
				9
				pencapaian
				kinerja yang lebih baik.
				tedin daik.

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
5	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen •	Mengoptimalkan
	Agama	52,01	Pimpinan	internalisasi atas
	Barabai	Hasil: 36,89	dan seluruh	pembangunan ZI
		IPAK: 3,95	aparatur	yang sudah
		IPKP: 3,91	tergambar	dilakukan dan
		Nilai Total:	pada hasil	meningkatkan
		88,90	desk	pengembangan
			evaluation –	manajemen
		- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	wawancara	risiko yang lebih
			dan verifikasi	dapat
			lapangan;	menghilangkan
			Kinerja	kemungkinan
			tahun 2023	terjadinya risiko
			telah	kegagalan
			tercapai;	pencapaian
			Peningkatan	kinerja dan
			Kualitas	penyimpangan
			Layanan	integritas dengan
			telah	penyempurnaan
			diupayakan	peta risiko dan
			melalui	mitigasi risiko
			sejumlah	secara
			inovasi	berkelanjutan,
			layanan dan	khususnya
			telah	terkait risiko
			diimplement	integritas.
			asikan; •	Mengembangkan
			• Tidak	inovasi yang
			terdapat	unggul
			peristiwa	dibandingkan
			yang	unit-unit kerja
			berdampak	lain, layak
			pada	dijadikan
			penurunan	percontohan,
			integritas	berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			hakim dan aparatur.	dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang
6	Pengadilan Agama Batang	Pengungkit: 39,26 Hasil: 36,06 IPAK: 3,86 IPKP: 3,81 Nilai Total: 75,32	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan	lebih baik Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
	(Kualitas	penyimpangan
			Layanan	integritas dengan
			telah	penyempurnaan
			diupayakan	peta risiko dan
			melalui	mitigasi risiko
			sejumlah	secara
			inovasi	berkelanjutan,
			layanan dan	khususnya
			telah	terkait risiko
			diimplement	integritas.
			asikan;	Mengembangkan
			• Tidak	inovasi yang
J			terdapat	unggul
			peristiwa	dibandingkan
			yang	unit-unit kerja
			berdampak	lain, layak
			pada	dijadikan
			penurunan	percontohan,
			integritas	berkelanjutan,
			hakim dan	dan secara nyata
			aparatur.	efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
		9		serta kualita
				pelayanan uni
				kerja;
				 Meningkatkan
				kerjasama
				dengan
		,		stakeholder yan
				terkait denga
				core bisni
				pengadilan
				dalam rangk

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
kao tao aka waka waka waka waka waka waka wak				pencapaian kinerja yang lebih baik
7	Pengadilan Agama Batulicin	Pengungkit: 48,60 Hasil: 37,41 IPAK: 3,99 IPKP: 3,99 Nilai Total: 86,01	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai; • Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplement asikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak	Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan Z yang sudah dilakukan dar meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian kinerja dar penyimpangan integritas dengar penyempurnaan peta risiko dar mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas. Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerjalain, layak

No	Nama Unit	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
	Kerja	2.54		11.
			pada	dijadikan
			penurunan	percontohan,
			integritas	berkelanjutan,
			hakim dan	dan secara nyata
			aparatur.	efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				Meningkatkan
				kerjasama
				dengan
				stakeholder yang
				terkait dengan
				core bisnis
				pengadilan
				dalam rangka
				pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik
8	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	• Agar dapat
	Agama	45,38	Pimpinan	melaksanakan
	Boyolali	Hasil: 35,18	dan seluruh	himbauan
		IPAK: 3,81	aparatur	gratifikasi pada
		IPKP: 3,66	tergambar	saat sidang
		Nilai Total:	pada hasil	pertama
		80,56	desk	Agar petugas
			evaluation –	yang bertugas
			wawancara	pada meja PTSP
			dan verifikasi	sesuai dengan
			lapangan;	tag nama pada
			• Kinerja	meja PTSP.

No	Nama Unit	Nilai	Catatan	Rekomendasi
4. 3	Kerja		Evaluator	
			telah	• Agar mendata
			tercapai;	tamu yang
			Peningkatan	datang pada PA
			Kualitas	Boyolali sebagai
			Layanan	bentuk
			telah	pengendalian
			diupayakan	internal
			melalui	
			sejumlah	
			inovasi	
			layanan dan	
			telah	
			diimplement	
			asikan;	
			• Tidak	
			terdapat	
			peristiwa	
			yang	
			berdampak	
			pada	
			penurunan	
			integritas	
			hakim dan	
			aparatur.	
9	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	Mengoptimalkan
	Agama	46,46	Pimpinan	internalisasi atas
	Cianjur	Hasil: 37,33	dan seluruh	pembangunan ZI
		IPAK: 3,98	aparatur	yang sudah
		IPKP: 3,98	tergambar	dilakukan dan
		Nilai Total:	pada hasil	meningkatkan
		83,79	desk	pengembangan
			evaluation –	manajemen
			wawancara	risiko yang lebih
			dan verifikasi	dapat
			lapangan;	menghilangkan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			Kinerja	kemungkinan
			tahun 2023	terjadinya risiko
			telah	kegagalan
			tercapai;	pencapaian
			Peningkatan	kinerja dan
			Kualitas	penyimpangan
			Layanan	integritas
			telah	dengan
			diupayakan	penyempurnaan
			melalui	peta risiko dan
			sejumlah	mitigasi risiko
			inovasi	secara
			layanan dan	berkelanjutan,
			telah	khususnya
			diimplement	terkait risiko
			asikan;	integritas.
			• Tidak	Mengembangkan
			terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	dijadikan
			integritas	percontohan,
			hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur.	dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				Meningkatkan
				kerjasama

terkait denga core bism pengadilan dalam rangl pencapaian kinerja yar lebih baik 10 Pengadilan Pengungkit: Agama 47,93 Donggala Hasil: 38,62 IPAK: 3,99 IPKP: 3,98 Nilai Total: 86,54 evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Nilai Tercapai; Kinerja there was a core bism pengadilan dalam pelayana dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan unit-unit ker kara kualitas Layanan dijadikan	No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
diupayakan berkelanjutan,		Pengadilan Agama	Pengungkit: 47,93 Hasil: 38,62 IPAK: 3,99 IPKP: 3,98 Nilai Total:	Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi	dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik Meningkatkan kualitas implementasi SPBE sehingga mampu mendorong terjadinya percepatan dalam pelayanan publik yang lebih efisien Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			asikan;	pelayanan unit
			• Tidak	kerja;
			terdapat	• Meningkatkan
			peristiwa	kerjasama
			yang	dengan
			berdampak	stakeholder yang
			pada	terkait dengan
	nin-ri-		penurunan	core bisnis
			integritas	pengadilan
		9.	hakim dan	dalam rangka
			aparatur.	pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik
11	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	Mengoptimalkan
	Agama	42,23	Pimpinan	internalisasi atas
	Gianyar	Hasil: 35,66	dan seluruh	pembangunan ZI
		IPAK: 3,8	aparatur	yang sudah
		IPKP: 3,78	tergambar	dilakukan dan
		Nilai Total:	pada hasil	meningkatkan
		77,89	desk	pengembangan
			evaluation –	manajemen
			wawancara	risiko yang lebih
			dan verifikasi	dapat
			lapangan;	menghilangkan
			Kinerja	kemungkinan
	4400		tahun 2023	terjadinya risiko
			telah	kegagalan
			tercapai;	pencapaian
		_	Peningkatan	kinerja dan
			Kualitas	penyimpangan
			Layanan	integritas
			telah	dengan
			diupayakan	penyempurnaan
			melalui	peta risiko dan
			sejumlah	mitigasi risiko

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			inovasi	secara
			layanan dan	berkelanjutan,
			telah	khususnya
			diimplement	terkait risiko
			asikan;	integritas.
			• Tidak	 Mengembangkan
			terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	dijadikan
			integritas	percontohan,
			hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur.	dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
				pencapaian
			\$ 100 miles	kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				 Meningkatkan
				kerjasama
				dengan
				stakeholder yang
				terkait dengan
				core bisnis
				pengadilan
				dalam rangka
				pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
12	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen •	Mengoptimalkan
	Agama Giri	44,81	Pimpinan	internalisasi atas
	Menang	Hasil: 37,46	dan seluruh	pembangunan ZI
		IPAK: 4	aparatur	yang sudah
		IPKP: 3,99	tergambar	dilakukan dan
		Nilai Total:	pada hasil	meningkatkan
		82,27	desk	pengembangan
			evaluation –	manajemen
			wawancara	risiko yang lebih
			dan verifikasi	dapat
		-	lapangan;	menghilangkan
			Kinerja	kemungkinan
			tahun 2023	terjadinya risiko
			telah	kegagalan
			tercapai;	pencapaian
	:	9.7	Peningkatan	kinerja dan
			Kualitas	penyimpangan
			Layanan	integritas
		La constant de la con	telah	dengan
			diupayakan	penyempurnaan
			melalui	peta risiko dan
			sejumlah	mitigasi risiko
			inovasi	secara
			layanan dan	berkelanjutan,
			telah	khususnya
			diimplement	terkait risiko
			asikan;	integritas.
			• Tidak	Mengembangkan
			terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
	1		penurunan	dijadikan
		_	integritas	percontohan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			hakim dan aparatur.	berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang
13	Pengadilan Agama Kayu Agung	Pengungkit: 42,94 Hasil: 36,74 IPAK: 3,89 IPKP: 3,65 Nilai Total: 79,68	• Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation – wawancara dan verifikasi lapangan; • Kinerja tahun 2023 telah tercapai;	• Mengoptimalkan internalisasi atas pembangunan ZI yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya risiko kegagalan pencapaian

7.7	Nama Unit		Catatan	
No	Kerja	Nilai	Evaluator	Rekomendasi
	Kerja		• Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplement asikan; • Tidak terdapat peristiwa yang berdampak	kinerja dan penyimpangan integritas dengan penyempurnaan peta risiko dan mitigasi risiko secara berkelanjutan, khususnya terkait risiko integritas; • Mengembangkan inovasi yang unggul dibandingkan unit-unit kerja
			pada penurunan integritas hakim dan aparatur.	lain, layak dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis

No	Nama Unit	NT-1	Catatan	Rekomendasi	
1/10	Kerja	Nilai	Evaluator	Rekomendasi	
				pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.	
14	Pengadilan Agama Kota Madiun	Pengungkit: 45,94 Hasil: 35,58 IPAK: 3,83 IPKP: 3,73 Nilai Total: 81,51	 Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui sejumlah inovasi layanan dan telah diimplement asikan; Tidak terdapat peristiwa 	yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan	

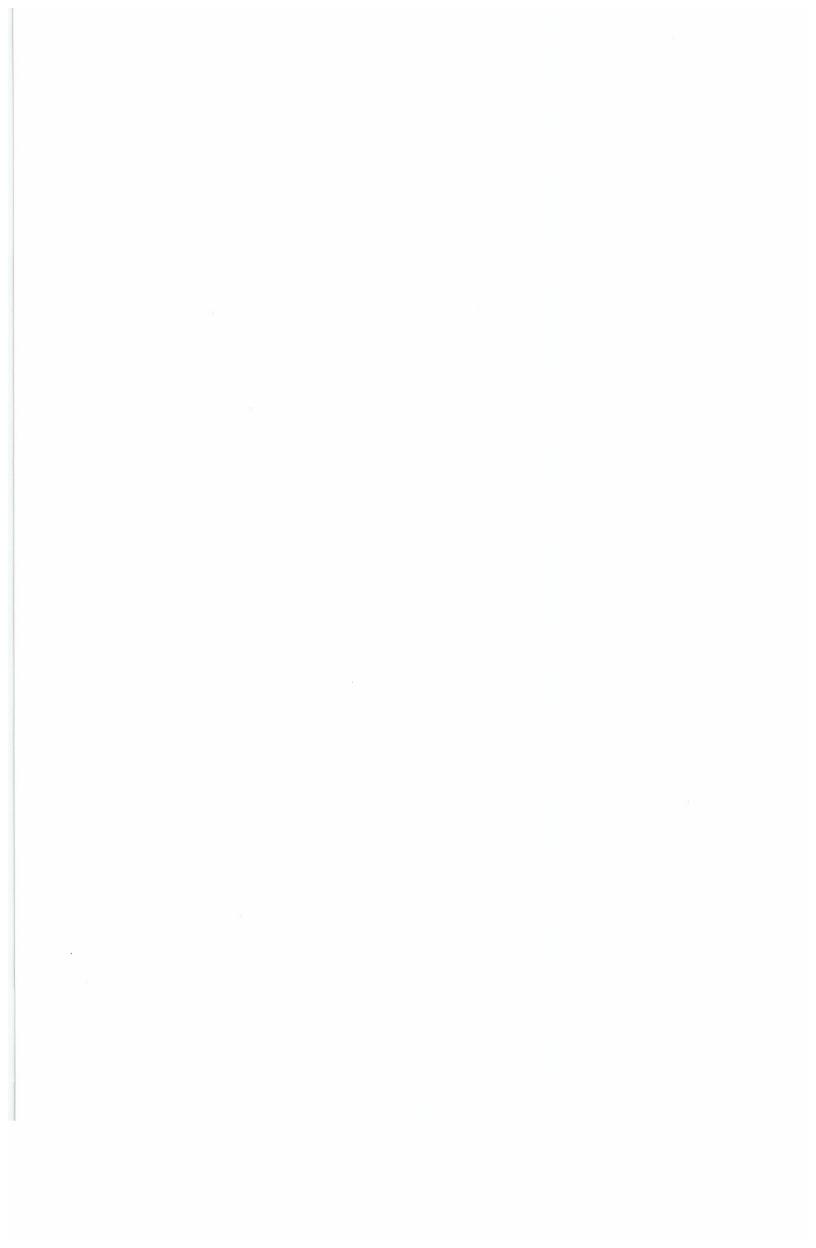
	ÿ		

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
	and the second participation of the second s		yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	dijadikan
			integritas	percontohan,
			hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur.	dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				 Meningkatkan
				kerjasama
				dengan
				stakeholder yang
			:	terkait dengan
				core bisnis
				pengadilan
				dalam rangka
,				pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik
15	Pengadilan	Pengungkit:	Komitmen	Meningkatkan
	Agama	47,59	Pimpinan	kualitas
	Luwuk	Hasil: 37,31	dan seluruh	implementasi
		IPAK: 3,83	aparatur	SPBE sehingga
		IPKP: 3,84	tergambar	mampu
		Nilai Total:	pada hasil	mendorong
		84,89	desk	terjadinya
			evaluation –	percepatan
			wawancara	dalam pelayanan
			dan verifikasi	publik yang lebih

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
4.	es " e selle Chen de suite.		lapangan;	efisien
			Kinerja	Mengembangkan
			tahun 2023	inovasi yang
			telah	unggul
			tercapai;	dibandingkan
			Peningkatan	unit-unit kerja
			Kualitas	lain, layak
			Layanan	dijadikan
			telah	percontohan,
			diupayakan	berkelanjutan,
			melalui	dan secara nyata
			sejumlah	efektif
			inovasi	meningkatkan
			layanan dan	pencapaian
			telah	kinerja utama
			diimplement	serta kualitas
			asikan;	pelayanan unit
			• Tidak	kerja;
			terdapat	 Meningkatkan
			peristiwa	kerjasama
			yang	dengan
			berdampak	stakeholder yang
			pada	terkait dengan
			penurunan	core bisnis
			integritas	pengadilan
			hakim dan	dalam rangka
			aparatur.	pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik
16	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	Kebijakan
	Agama	49,50	Pimpinan	terhadap
	Mesuji	Hasil: 34,99	dan seluruh	pelaporan
-		IPAK: 3,73	aparatur	gratifikasi agar
		IPKP: 3,75	tergambar	disusun sesuai
		Nilai Total:	pada hasil	dengan SK

No	Nama Unit Kerja	Nilai		Catatan Evaluator		Rekomendasi
11 122		84,49	1 2 2 3	desk		Kabawas Nomor
		01,15		evaluation –		28 Tahun 2021;
				wawancara	6	Mengoptimalkan
				dan verifikasi		internalisasi atas
				lapangan;		pembangunan ZI
				Kinerja		yang sudah
				tahun 2023		dilakukan dan
		All Additions of the Assessment of thead of the Assessment of the Assessment of the Assessment of the		telah		meningkatkan
				tercapai;		pengembangan
				-		
			•	Peningkatan		manajemen
				Kualitas		risiko yang lebih
				Layanan		dapat
				telah		menghilangkan
				diupayakan		kemungkinan
				melalui		terjadinya risiko
				sejumlah		kegagalan
				inovasi		pencapaian
				layanan dan		kinerja dan
				telah		penyimpangan
				diimplement		integritas
				asikan;		dengan
			•	Tidak		penyempurnaan
				terdapat		peta risiko dan
				peristiwa		mitigasi risiko
				yang		secara
				berdampak		berkelanjutan,
				pada		khususnya
				penurunan		terkait risiko
				integritas		integritas;
				hakim dan	0	Mengembangkan
				aparatur.		inovasi yang
						unggul
						dibandingkan
						unit-unit kerja
						lain, layak

	Nama Unit		Catatan	
No	Kerja	Nilai	Evaluator	Rekomendasi
				dijadikan percontohan, berkelanjutan, dan secara nyata efektif meningkatkan pencapaian kinerja utama serta kualitas pelayanan unit kerja; • Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
17	Pengadilan Agama Pacitan	Pengungkit: 41,63 Hasil: 37,24 IPAK: 3,98 IPKP: 3,96 Nilai Total: 78,86	Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023	yang sudah dilakukan dan meningkatkan pengembangan manajemen risiko yang lebih dapat menghilangkan kemungkinan



No	Nama Unit	Nilai		Catatan			Rekomendasi	
INO	Kerja	TAILST		Evaluato	r		Kekoili	Judoi
				telah			kegagala	n
				tercapai;			pencapai	an
			•	Peningkata	an		kinerja	dan
				Kualitas			penyimp	angan
				Layanan			integritas	3
				telah			dengan	
				diupayaka	n		penyemp	urnaan
				melalui			peta ris	iko dar
				sejumlah			mitigasi	risiko
				inovasi			secara	
				layanan d	dan		berkelan	jutan,
				telah			khususn	ya
				diimpleme	nt		terkait	risiko
				asikan;			integrita	s.
			•	Tidak		9	Mengemi	bangkar
				terdapat			inovasi	yang
				peristiwa			unggul	
	3			yang			dibandin	gkan
				berdampal	k		unit-unit	kerja
				pada			lain,	layak
				penurunar	n-		dijadikar	ı
				integritas			perconto	han,
				hakim d	dan		berkelan	jutan,
				aparatur.			dan seca	ra nyata
							efektif	
							meningk	atkan
							pencapai	ian
							kinerja	utama
				,			serta	kualitas
6							pelayana	n uni
							kerja;	
						0	Meningk	atkan
							kerjasan	ıa
							dengan	
							stakehol	der yanş

NI	Nama Unit	NT:1-:		Catatan		
No	Kerja	Nilai		Evaluator		Rekomendasi
						terkait dengan
						core bisnis
						pengadilan
						dalam rangka
						pencapaian
						kinerja yang
						lebih baik
18	Pengadilan	Pengungkit:	•	Komitmen	•	Mengoptimalkan
	Agama	46,13		Pimpinan		internalisasi atas
	Pematang	Hasil: 37,88		dan seluruh		pembangunan ZI
	Siantar	IPAK: 3,9		aparatur		yang sudah
		IPKP: 3,9		tergambar		dilakukan dan
		Nilai Total:		pada hasil		meningkatkan
		84,00		desk		pengembangan
				evaluation –		manajemen
				wawancara		risiko yang lebih
				dan verifikasi		dapat
				lapangan;		menghilangkan
			•	Kinerja		kemungkinan
	·			tahun 2023		terjadinya risiko
				telah		kegagalan
				tercapai;		pencapaian
			0	Peningkatan		kinerja dan
				Kualitas		penyimpangan
				Layanan		integritas
				telah		dengan
		- Additional Control of the Control		diupayakan		penyempurnaan
				melalui		peta risiko dan
				sejumlah		mitigasi risiko
				inovasi		secara
				layanan dan		berkelanjutan,
				telah		khususnya
				diimplement		terkait risiko
				asikan;		integritas.;

D.T.	Nama Unit	Strenger	Catatan	Rekomendasi
No	Kerja	Nilai	Evaluator	Rekomendasi
			• Tidak	Mengembangkan
		Indiana de la companya de la company	terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
			berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	dijadikan
			integritas	percontohan,
			hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur.	dan secara nyata
				efektif
				meningkatkan
	:			pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				Meningkatkan
				kerjasama
				dengan
				stakeholder yang
				terkait dengan
				core bisnis
				pengadilan
				dalam rangka
				pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik.
19	Pengadilan	Pengungkit:	• Komitmen	• Mengoptimalkan
	Agama	40,43	Pimpinan	internalisasi atas
	Sukabumi	Hasil: 34,70	dan seluruh	pembangunan ZI
		IPAK: 3,72	aparatur	yang sudah
		IPKP: 3,64	tergambar	dilakukan dan
		Nilai Total:	pada hasil	meningkatkan
		75,13	desk	pengembangan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			evaluation –	manajemen
			wawancara	risiko yang lebih
			dan verifikasi	dapat
			lapangan;	menghilangkan
			• Kinerja	kemungkinan
			tahun 2023	terjadinya risiko
	p.		telah	kegagalan
			tercapai;	pencapaian
			 Peningkatan 	kinerja dan
			Kualitas	penyimpangan
			Layanan	integritas
			telah	dengan
			diupayakan	penyempurnaan
			melalui	peta risiko dan
			sejumlah	mitigasi risiko
			inovasi	secara
			layanan dan	berkelanjutan,
			telah	khususnya
			diimplement	terkait risiko
			asikan;	integritas;
			• Tidak	Mengembangkan
	0		terdapat	inovasi yang
			peristiwa	unggul
			yang	dibandingkan
	and the second s		berdampak	unit-unit kerja
			pada	lain, layak
			penurunan	dijadikan
			integritas	percontohan,
			hakim dan	berkelanjutan,
			aparatur.	dan secara nyata
			_	efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
				pelayanan unit kerja; Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan core bisnis pengadilan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik.
20	Pengadilan Agama Sukoharjo	Pengungkit: 43,76 Hasil: 35,58 IPAK: 3,83 IPKP: 3,73 Nilai Total: 79,34	Komitmen Pimpinan dan seluruh aparatur tergambar pada hasil desk evaluation — wawancara dan verifikasi lapangan; Kinerja tahun 2023 telah tercapai; Peningkatan Kualitas Layanan telah diupayakan melalui	pembuatan inovasi

XT-	Nama Unit		Catatan	Rekomendasi
No	Kerja	Nilai	Evaluator	Rekomendasi
			inovasi	
			layanan dan	
			telah	
			diimplement	
			asikan;	
			• Tidak	
			terdapat	
			peristiwa	
			yang	
			berdampak	
			pada	
			penurunan	
			integritas	
			hakim dan	
			aparatur.	
21	Pengadilan	Pengungkit:	Komitmen	 Mengoptimalkan
	Agama	44,40	Pimpinan	internalisasi atas
	Tanjung	Hasil: 36,01	dan seluruh	pembangunan ZI
	Karang	IPAK: 3,83	aparatur	yang sudah
		IPKP: 3,83	tergambar	dilakukan dan
		Nilai Total:	pada hasil	meningkatkan
		80,41	desk	pengembangan
			evaluation –	manajemen
			wawancara	risiko yang dapat
			dan verifikasi	menghilangkan
			lapangan;	kemungkinan
			• Kinerja	terjadinya risiko
			tahun 2023	kegagalan
			telah	pencapaian
			tercapai;	kinerja dan
			Peningkatan	penyimpangan
			Kualitas	integritas
			Layanan	dengan
			telah	penyempurnaan
	and the same of th		diupayakan	peta risiko dan

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			melalui	mitigasi risiko
			sejumlah	secara
			inovasi	berkelanjutan,
			layanan dan	khususnya
			telah	terkait risiko
			diimplement	integritas.
			asikan;	Mengembangkan
			• Tidak	inovasi yang
			terdapat	unggul
			peristiwa	dibandingkan
	ikalikunda apar		yang	unit-unit kerja
			berdampak	lain, layak
			pada	dijadikan
			penurunan	percontohan,
			integritas	berkelanjutan,
			hakim dan	dan secara nyata
			aparatur.	efektif
				meningkatkan
				pencapaian
				kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				Meningkatkan
				kerjasama
			49	dengan
				stakeholder yang
				terkait dengan
				core bisnis
			100	pengadilan
				dalam rangka
				pencapaian
				kinerja yang
				lebih baik.

No	Nama Unit Kerja	Nilai		Catatan Evaluator		Rekomendasi
22	Pengadilan	Pengungkit:	•	Komitmen	0	Mengoptimalkan
	Agama	41,70		Pimpinan		internalisasi atas
	Tilamuta	Hasil: 36,93		dan seluruh		pembangunan ZI
		IPAK: 3,94		aparatur		yang sudah
		IPKP: 3,93		tergambar		dilakukan dan
		Nilai Total:		pada hasil		meningkatkan
	,	78,63		desk		pengembangan
	0)			evaluation –		manajemen
				wawancara		risiko yang dapat
				dan verifikasi	,	menghilangkan
				lapangan;		kemungkinan
		.2	6	Kinerja		terjadinya risiko
				tahun 2023		kegagalan
				telah		pencapaian
				tercapai;		kinerja dan
			•	Peningkatan		penyimpangan
				Kualitas		integritas
				Layanan		dengan
				telah		penyempurnaan
				diupayakan		peta risiko dan
				melalui		mitigasi risiko
	ŀ			sejumlah		secara
				inovasi		berkelanjutan,
		27		layanan dan		khususnya
				telah		terkait risiko
				diimplement		integritas.
				asikan;	8	Mengembangkan
			•	Tidak		inovasi yang
				terdapat		unggul
				peristiwa		dibandingkan
				yang		unit-unit kerja
				berdampak		lain, layak
				pada		dijadikan
				penurunan		percontohan,
				integritas		berkelanjutan,

No	Nama Unit Kerja	Nilai	Catatan Evaluator	Rekomendasi
			hakim dan	dan secara nyata
			aparatur.	efektif
				meningkatkan
				pencapaian
	_			kinerja utama
				serta kualitas
				pelayanan unit
				kerja;
				 Meningkatkan
				kerjasama
	a de la compansión de l			dengan
		222		stakeholder yang
		, + 1		terkait dengar
				core bisnis
				pengadilan
			=	dalam rangka
				pencapaian
				kinerja yanş
				lebih baik.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SUCIYANTO